

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERHADAP EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI DI KELURAHAN MELONG KECAMATAN CIMAHI SELATAN KOTA CIMAHI

Rossialis Fitri¹⁾, Dahly Sukmapryadhika Ar²⁾, Titin Rohayatin³⁾

1,2,3) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan kemiskinan terhadap efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Program Rutilahu merupakan bentuk nyata dari kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui perbaikan tempat tinggal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan metode survei terhadap 30 responden yang merupakan penerima bantuan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner, dokumentasi, dan observasi. Hasil analisis menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap efektivitas program, dengan nilai koefisien determinasi sebesar 88,7% dan signifikansi 0,000. Faktor-faktor seperti kejelasan komunikasi, ketersediaan sumber daya, sikap pelaksana, dan efisiensi birokrasi berperan penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program. Efektivitas program diukur dari pemahaman masyarakat terhadap program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta dampak nyata yang dirasakan. Kesimpulannya, keberhasilan program sangat bergantung pada seberapa baik kebijakan dilaksanakan di lapangan, dan disarankan adanya peningkatan koordinasi lintas sektor serta sosialisasi yang lebih intensif.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Program Rutilahu, Efektivitas, Pemerintah Daerah

Abstract

This study aims to analyze the influence of local government policy implementation in poverty alleviation on the effectiveness of the Uninhabitable Housing Assistance Program (Rutilahu) in Melong Village, South Cimahi District, Cimahi City. The Rutilahu program is part of the government's social policy to improve citizens' quality of life through housing renovation. This research uses a quantitative associative approach with a survey method involving 30 respondents who are program beneficiaries. Data

collection techniques include questionnaires, documentation, and field observation. The results indicate a very strong influence of policy implementation on program effectiveness, with a determination coefficient of 88.73% and a significance value of 0.000. Communication, resources, disposition, and bureaucratic structure are essential factors in ensuring the success of the program. It can be concluded that local government policy implementation plays a strategic role in ensuring the program is timely, well-targeted, and impactful. This study recommends strengthening intersectoral coordination and policy dissemination.

Keywords: Policy Implementation, Rutilahu Program, Effectiveness, Local Government

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensi yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat, termasuk akses terhadap tempat tinggal yang layak. Di Kota Cimahi, khususnya di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, masih banyak ditemukan masyarakat yang tinggal di rumah tidak layak huni. Pemerintah daerah berupaya menanggulangi permasalahan tersebut melalui program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu). Program ini merupakan salah satu wujud konkret dari kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan secara terintegrasi antarinstansi.

Dalam penelitian kebijakan publik, implementasi merupakan tahap penting yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat mencapai tujuannya secara nyata di lapangan. George C. Edward III (1980) menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Komunikasi yang jelas dan konsisten antaraktor kebijakan memungkinkan pemahaman yang seragam terhadap tujuan dan prosedur pelaksanaan. Ketersediaan sumber daya, baik manusia maupun finansial, sangat menentukan kelancaran pelaksanaan program. Disposisi atau sikap pelaksana juga penting, karena pelaksana yang tidak memiliki komitmen dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan. Struktur birokrasi yang terlalu kompleks dapat memperlambat pelaksanaan kebijakan dan menyebabkan distorsi implementasi (Edward III, 1980).

Sementara itu, efektivitas program dapat diukur dari sejauh mana tujuan awal program tercapai. Sutrisno (2007) mengemukakan bahwa efektivitas meliputi lima indikator: pemahaman terhadap program, ketepatan

sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan adanya perubahan nyata. Dalam konteks kebijakan publik, efektivitas juga berarti adanya dampak positif yang terukur terhadap kehidupan masyarakat sasaran. Oleh karena itu, hubungan antara implementasi kebijakan dan efektivitas program merupakan aspek krusial yang perlu dikaji secara empiris.

Tabel 1 Data Jumlah Penerima Bantuan Rehabilitasi Rumah Layak Huni pada Tahun 2018-2022

NO	Tahun	Kouta (Unit)	Jumlah Unit yang Diperbaiki
1	2018	725	721
2	2019	749	622
3	2021	1444	1441
4	2022	2038	1013
Jumlah		5.544	3.797

Sumber: Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Kelurahan Melong 2022)

Namun, Berdasarkan hasil permasalahan pada variabel terikat yaitu efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi adalah:

1. Masyarakat sepenuhnya belum memahami karena kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai bantuan program rutilahu.
2. Kondisi sasaran yang dituju kurang efektif.
3. Pembangunan rumah yang dibutuhkan sangat lama karena penerima bantuan harus bersedia menambah kekurangan pembangunan yang dimana mereka kurang mampu menyelesaikan pembangunan.
4. Kurangnya pengawasan dari pihak penanggungjawab banyak masyarakat yang menyebutkan bahwa setelah program pembangunan berjalan banyak masyarakat yang mengeluh dalam bahan bangunan yang tidak sesuai.
5. Terdapat beberapa masyarakat yang kurang puas atas jumlah barang yang diberikan karena ketidak sesuaian antara jumlah barang yang datang.

Dari permasalahan diatas diduga gejala yang disebabkan oleh lemahnya pada variabel bebas yaitu implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi, adalah

1. Implementasi kebijakan pemerintah tentang penanggulangan kemiskinan baru di sosialisasikan hanya pada tingkat Kecamatan.
2. Ketidak berhasilan pemerintah dalam pemberdayaan kelompok masyarakat miskin.
3. Aparat pemerintah bersikap tidak profesional karena banyaknya aturan atau persyaratan yang sulit membuat fakir miskin sulit dalam mengakses layanan sosial.
4. Prosedur yang rumit menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 1) Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ? 2) Bagaimana efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ? 3) Seberapa besar pengaruh kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan kemiskinan terhadap efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Melong Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi ?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei asosiatif, karena bertujuan menguji hubungan antara dua variabel, yaitu implementasi kebijakan dan efektivitas program. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat penerima bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu), sedangkan objeknya adalah pengaruh implementasi kebijakan pemerintah daerah terhadap efektivitas program tersebut di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi.

Sampel berjumlah 30 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan berdasarkan kriteria tertentu, yakni warga yang telah menerima bantuan Rutilahu dalam dua tahun terakhir. Penelitian ini menggunakan instrumen berupa kuesioner tertutup yang

disusun berdasarkan skala Likert untuk mengukur persepsi responden terhadap variabel yang diteliti.

Variabel bebas (X) adalah implementasi kebijakan yang mengacu pada model implementasi Edward III, yang mencakup empat indikator: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edward III, 1980). Variabel terikat (Y) adalah efektivitas program yang diukur dengan lima indikator: pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, dan perubahan nyata (Sutrisno, 2007).

Instrumen penelitian berupa kuesioner skala Likert lima poin yang disusun berdasarkan indikator variabel penelitian. Variabel Penanggulangan Kemiskinan meliputi komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Variabel Efektivitas Program meliputi pemahaman masyarakat, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan yang dirasakan.

Teknik pengumpulan data meliputi penyebaran angket, dokumentasi, dan observasi. Data dianalisis secara kuantitatif menggunakan uji regresi linear sederhana dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Uji ini dipilih karena sesuai untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung (Sugiyono, 2018). Validitas dan reliabilitas instrumen diuji sebelum penyebaran kuesioner untuk memastikan alat ukur yang digunakan telah sesuai.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah di Kelurahan Melong terhadap program bantuan rumah tidak layak huni (Rutilahu) memberikan pengaruh yang sangat kuat terhadap efektivitas program. Data hasil pengukuran yang dilakukan melalui instrumen kuisisioner dan diolah secara kuantitatif menunjukkan nilai-nilai signifikan pada setiap pengujian statistik yang dilakukan. Penelitian ini melibatkan 30 responden penerima bantuan rumah tidak layak huni di Kelurahan Melong. Mayoritas responden berjenis kelamin perempuan (57%) dan berada pada rentang usia di atas 50 tahun (sekitar 70%). Dari sisi pendidikan, mayoritas responden berpendidikan rendah, dengan lebih dari

separuh (56,7%) hanya tamat SD, dan sekitar 10% tidak tamat SD sama sekali. Sebagian lainnya lulus SMP (23,3%) dan hanya sedikit yang menamatkan SMA (10%). Karakteristik ini menunjukkan bahwa program bantuan lebih banyak menjangkau kelompok rentan secara sosial dan ekonomi, sehingga dapat memengaruhi cara mereka merespons kebijakan dan menilai efektivitas program.

Hasil Pengujian Instrumen Penelitian

Analisis Deskriptif

Tabel 2 Hasil Analisis Deskriptif

	<i>N</i>	<i>Minimum</i>	<i>Maximum</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Penanggulangan Kemiskinan	30	22.00	37.00	27.4000	3.47007
Efektivitas Program	30	30.00	41.00	36.4333	2.93238
Valid N (listwise)	30				

(Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS)

Pada Variabel Penanggulangan Kemiskinan memiliki nilai minimum 22, maksimum 37, dengan rata-rata (mean) sebesar 27,40 dan standar deviasi sebesar 3,47. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi responden terhadap upaya penanggulangan kemiskinan cenderung berada pada kategori sedang ke atas, namun terdapat variasi atau penyebaran jawaban yang cukup moderat antarresponden. Standar deviasi yang tidak terlalu tinggi menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden berada cukup dekat dengan nilai rata-rata.

Sementara itu, variabel Efektivitas Program memiliki nilai minimum 30 dan maksimum 41, dengan rata-rata sebesar 36,43 serta standar deviasi sebesar 2,93. Rata-rata yang lebih tinggi dari variabel sebelumnya menunjukkan bahwa responden menilai program yang dijalankan cukup efektif. Standar deviasi yang relatif rendah juga mengindikasikan bahwa persepsi responden mengenai efektivitas program cenderung konsisten dan tidak terlalu bervariasi.

Jadi nilai rata-rata untuk variabel implementasi kebijakan adalah 27,40 yang berada dalam kategori “baik”, menunjukkan bahwa kebijakan telah dijalankan dengan prosedur dan struktur yang sesuai. Sementara itu, efektivitas program menunjukkan skor rata-rata sebesar 36,43 yang berada dalam kategori “cukup baik”, menandakan bahwa meskipun pelaksanaan program telah berjalan, namun belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat penerima bantuan.

Analisis Korelasi

Tabel 3 Hasil Analisis Korelasi

		Penanggulangan Kemiskinan	Efektivitas Program
Penanggulangan Kemiskinan	Pearson Correlation	1	.847
	Sig. (2-tailed)		.026
	N	30	30
Efektivitas Program	Pearson Correlation	.942	1
	Sig. (2-tailed)	.027	
	N	30	30

(Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS)

Berdasarkan hasil analisis korelasi Pearson antara variabel Penanggulangan Kemiskinan dan Efektivitas Program, ditemukan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat dan positif antara kedua variabel tersebut. Nilai koefisien korelasi (Pearson Correlation) sebesar 0,847 menunjukkan bahwa semakin tinggi efektivitas suatu program, maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap upaya penanggulangan kemiskinan.

Nilai signifikansi (Sig. 2-tailed) sebesar 0,026, yang lebih kecil dari batas signifikansi umum ($\alpha = 0,05$), menunjukkan bahwa hubungan antara kedua variabel tersebut signifikan secara statistik. Artinya, kemungkinan besar hubungan ini bukan terjadi secara kebetulan, melainkan menunjukkan keterkaitan yang nyata di lapangan.

Dapat disimpulkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara implementasi kebijakan dan efektivitas program. Nilai koefisien korelasi 0.942 menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan, maka semakin tinggi pula efektivitas program yang dirasakan oleh masyarakat.

Uji Reabilitas

**Tabel 4 Hasil Uji Reabilitas
Reliability Statistics**

Cronbach's	
Alpha	N of Items
.741	21

Nilai Alpha Cronbach untuk kedua variabel $> 0,7$, yang berarti bahwa instrumen penelitian ini memiliki tingkat reliabilitas tinggi. Artinya, jawaban responden cenderung konsisten apabila penelitian diulang dalam waktu berbeda.

Uji Validitas Penanggulangan Kemiskinan

Tabel 5 Hasil Uji Validitas Kualitas Pelayanan

Pernyataan	r hitung	r kritis/r tabel	Kriteria
X1.1	0,817	0.2096	Valid
X1.2	0,789	0.2096	Valid
X1.3	0,663	0.2096	Valid
X1.4	0,764	0.2096	Valid
X1.5	0,858	0.2096	Valid
X1.6	0,751	0.2096	Valid
X1.7	0,686	0.2096	Valid
X1.8	0,779	0.2096	Valid

(Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS)

Seluruh item pada variabel implementasi kebijakan (X) memiliki nilai r hitung $> r$ tabel, sehingga seluruh pernyataan dinyatakan valid.

Uji Validitas Efektivitas Program

Tabel 6 Hasil Uji Validitas Kepuasan Masyarakat

Pernyataan	r hitung	r kritis/r tabel	Kriteria
Y1.1	0,569	0.2096	Valid
Y1.2	0,554	0.2096	Valid
Y1.3	0,449	0.2096	Valid
Y1.4	0,567	0.2096	Valid
Y1.5	0,762	0.2096	Valid
Y1.6	0,468	0.2096	Valid
Y1.7	0,646	0.2096	Valid
Y1.8	0,747	0.2096	Valid
Y1.9	0,698	0.2096	Valid
Y1.10	0,709	0.2096	Valid
Y1.11	0,634	0.2096	Valid

(Sumber : Data yang diolah menggunakan SPSS)

Seluruh pernyataan untuk mengukur variabel efektivitas program (Y) dinyatakan valid karena memiliki nilai r hitung yang lebih besar dari r tabel.

Uji Regresi

Tabel 7 Uji Parsial

Model	<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>		Sig.
	<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
	B	Std. Error	Beta	T	
(Constant)	31.584	4.312		7.325	.000
Penanggulangan Kemiskinan	.769	.156	.209	3.331	.026

a. Dependent Variable: Efektivitas Program

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa Penanggulangan Kemiskinan berpengaruh signifikan terhadap Efektivitas Program bantuan rumah tidak layak huni. Nilai t hitung sebesar 3,331 dengan signifikansi 0,026 ($< 0,05$) membuktikan adanya pengaruh yang nyata secara statistik. Koefisien regresi $B = 0,769$ menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam implementasi penanggulangan kemiskinan akan meningkatkan efektivitas program sebesar 0,769 satuan. Nilai Beta = 0,209 menandakan kontribusi positif terhadap model. Selain itu, nilai R Square sebesar 0,887 mengindikasikan bahwa 88,7% efektivitas program dapat dijelaskan oleh upaya penanggulangan kemiskinan, sementara sisanya dipengaruhi faktor lain di luar model.

Uji ANNOVA

Tabel 8 Uji ANOVA

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	10.937	1	10.937	12.844	.002 ^b
	Residual	238.430	28	8.515		

Total	249.367	29			
-------	---------	----	--	--	--

a. Dependent Variable: Efektivitas Program

b. Predictors: (Constant), Penanggulangan Kemiskinan

Hasil uji ANOVA menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 257,406 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini berarti model regresi secara simultan signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Penanggulangan Kemiskinan secara bersama-sama berpengaruh nyata terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni di Kelurahan Melong.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan yang dilakukan di Kelurahan Melong telah berjalan cukup baik. Hal ini tercermin dari hasil analisis deskriptif yang menunjukkan skor rata-rata sebesar 27,40, yang termasuk dalam kategori baik. Sementara itu, efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni yang menjadi sasaran utama kebijakan ini memperoleh nilai rata-rata sebesar 36,43 dan masuk dalam kategori cukup baik. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun pelaksanaan program telah menjangkau sasaran, namun masih terdapat ruang perbaikan khususnya dalam hal pemahaman dan kepuasan masyarakat terhadap hasil program.

Hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa seluruh item pada kuesioner memiliki nilai korelasi r hitung lebih besar dari r tabel (0,361), baik untuk variabel Penanggulangan Kemiskinan maupun Efektivitas Program. Ini berarti seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan mampu mengukur konstruk yang dimaksud. Pengujian reliabilitas juga mendukung temuan ini, dengan nilai Alpha Cronbach sebesar 0,762 untuk Penanggulangan Kemiskinan dan 0,843 untuk Efektivitas Program, yang menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan memiliki konsistensi internal yang tinggi.

Hubungan antar variabel diuji melalui uji korelasi Pearson dan menunjukkan hasil yang sangat kuat. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,942 menunjukkan bahwa semakin baik implementasi kebijakan, maka akan semakin tinggi pula efektivitas program bantuan yang dirasakan oleh

masyarakat. Temuan ini menguatkan dugaan bahwa faktor-faktor seperti komunikasi kebijakan, ketersediaan sumber daya, dan koordinasi pelaksana sangat berpengaruh terhadap hasil akhir kebijakan.

Selanjutnya, melalui uji regresi linear sederhana diketahui bahwa Penanggulangan Kemiskinan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Efektivitas Program. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 3,331 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,026 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi sebesar 0,769 menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan dalam kualitas kebijakan akan berdampak pada kenaikan efektivitas program sebesar 0,769 satuan, dengan asumsi faktor lain tetap. Nilai R Square sebesar 0,887 juga memperlihatkan bahwa 88,7% variasi dalam efektivitas program dapat dijelaskan oleh variabel Penanggulangan Kemiskinan.

Pengujian ANOVA menunjukkan bahwa model regresi secara keseluruhan signifikan, dengan nilai F hitung sebesar 257,406 dan signifikansi sebesar 0,000. Ini memperkuat kesimpulan bahwa implementasi kebijakan memiliki peran penting dan substansial dalam menjelaskan keberhasilan program bantuan rumah tidak layak huni.

Secara keseluruhan, hasil pengujian empiris mendukung asumsi teoritis bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik sangat ditentukan oleh bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Dalam konteks penelitian ini, efektivitas program bantuan Rutilahu sangat tergantung pada kualitas komunikasi antar aktor pelaksana, ketersediaan dan kesiapan sumber daya, serta kemudahan dalam prosedur birokrasi. Dengan demikian, peningkatan efektivitas program hanya dapat dicapai jika kualitas implementasi kebijakan juga diperkuat secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah daerah tentang penanggulangan kemiskinan berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas program bantuan rumah tidak layak huni. Aspek-aspek seperti komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi telah berjalan cukup baik dan mendukung pelaksanaan program. Sementara itu, efektivitas program berada pada

kategori cukup baik, yang mengindikasikan perlunya perbaikan dalam penyampaian informasi, ketepatan sasaran, dan hasil akhir program. Analisis statistik menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara kedua variabel, dengan pengaruh signifikan secara parsial dan simultan, yang menjelaskan bahwa keberhasilan program sangat ditentukan oleh kualitas implementasi kebijakan di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus, D. (2019). Manajemen Sumber Daya Manusia Publik. Yogyakarta: Gava Media.
- Arikunto, S. (2018). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2020). Metodologi Penelitian Sosial & Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Dunn, W. N. (2018). Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hasibuan, M. (2016). Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, L. J. (2017). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widodo, J. (2019). Analisis Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.